

Prinsip Dakwah Sosial dalam Masyarakat Digital Kontemporer: Konteks dan Konten, Data dan Fakta, serta Respons dan Solusi

Principles of Social Da'wah in Contemporary Digital Society: Context and Content, Data and Facts, and Responses and Solutions

Eka Riyana¹, Abdul Syukur², Sonhaji³, Mawardi⁴

^{1,2,3,4}Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05 October 2026

Revised 15 October 2026

Accepted 20 October 2026

Available online 28 October 2026

Keywords

social da'wah; da'wah sociology; digital religion; information verification; community empowerment.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The expansion of da'wah through digital media creates opportunities for participation while raising questions about authority, unequal access, and informational accountability. This article formulates principles of digital social da'wah by connecting context and content, data and facts, and responses and solutions from the perspective of contemporary da'wah sociology. It employs a critical narrative literature review and conceptual-comparative analysis of research on digital religion, religious authority, transformative da'wah, information disorder, and empowerment. Sources were purposively selected for their relevance, traceability, methodological clarity, and analytical contribution. The review distinguishes case-based evidence, conceptual arguments, secondary statistics, and Qur'anic normative orientations. The synthesis identifies three requirements: messages responsive to social conditions and community voices; adequate evidence accompanied by explicit uncertainty and respect for human dignity; and communication responses connected to actionable social support. It proposes three accountability tests concerning contextual adequacy, evidential appropriateness, and practical feasibility.

ABSTRAK

Perluasan dakwah melalui media digital membuka kesempatan partisipasi sekaligus menghadirkan persoalan otoritas, ketimpangan akses, dan pertanggungjawaban informasi. Artikel ini bertujuan merumuskan prinsip dakwah sosial digital melalui hubungan konteks dan konten, data dan fakta, serta respons dan solusi dalam perspektif sosiologi dakwah kontemporer. Penelitian menggunakan kajian kepustakaan naratif kritis dengan analisis konseptual-komparatif atas penelitian agama digital, otoritas keagamaan, dakwah transformatif, gangguan informasi, dan pemberdayaan. Sumber dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, keterlacakan, kejelasan metode, serta kontribusinya terhadap persoalan yang dibahas. Kajian membedakan bukti kasus, argumentasi konseptual, statistik sekunder, dan orientasi normatif Al-Qur'an. Sintesis menghasilkan tiga tuntutan pertanggungjawaban: kesesuaian pesan dengan kondisi serta suara masyarakat; kecukupan bukti yang disertai batas kepastian dan perlindungan martabat; serta keterhubungan respons komunikasi dengan tindakan sosial yang dapat ditindaklanjuti.

PENDAHULUAN

Dakwah sosial dalam masyarakat digital berlangsung di tengah hubungan yang makin rapat antara komunikasi keagamaan, pengalaman keseharian, dan distribusi sumber daya. Ceramah singkat, percakapan grup, penggalangan bantuan, serta layanan konsultasi daring dapat memperluas jangkauan kepedulian. Namun, perpindahan saluran komunikasi juga mengubah siapa yang didengar, bagaimana suatu persoalan didefinisikan, dan pihak mana yang menanggung akibat pesan. Persoalan dakwah kontemporer karena itu mencakup hubungan antara penyampaian nilai Islam dan perubahan relasi sosial yang menyertainya. Besarnya akses internet memberi konteks bagi persoalan tersebut. Badan Pusat Statistik (2025) melaporkan bahwa 72,78% penduduk berusia lima tahun ke atas mengakses internet dalam tiga bulan terakhir pada 2024. Angka itu menunjukkan cakupan penggunaan internet dengan batas umur

dan periode pengukuran tertentu. Angka tersebut tidak mengukur keterlibatan dalam dakwah, kemampuan memeriksa informasi, ataupun kualitas akses setiap warga. Penggunaan statistik nasional tanpa memperhatikan batas indikator justru dapat menutupi pengalaman kelompok yang kesulitan perangkat, biaya, bahasa, atau pendampingan.

Penelitian agama digital telah memperlihatkan perlunya membaca hubungan ruang daring dengan kehidupan di luar jaringan. Campbell dan Evolvi (2020) menempatkan teknologi dalam konteks praktik, identitas, komunitas, serta otoritas keagamaan. Pada konteks Indonesia, Solahudin dan Fakhruroji (2020) menunjukkan keterkaitan pembelajaran Islam melalui media sosial dengan populisme keagamaan dan perubahan otoritas. Perspektif tersebut membantu memahami dakwah sebagai praktik sosial yang dipengaruhi pilihan pengguna, kelembagaan, serta lingkungan media, sehingga perubahan tidak dapat diterangkan hanya melalui keberadaan perangkat teknologi. Literatur mutakhir mengembangkan pembahasan dari arah yang berbeda. Rachman et al. (2025) menggunakan perspektif post-normal times untuk membaca transformasi otoritas, sedangkan Sulfikar dan Yasmine (2025) membahas legitimasi keagamaan dalam kondisi platformisasi. Zaman et al. (2026) menelaah kontestasi ulama dan influencer. Sementara itu, dakwah transformatif menempatkan persoalan keadilan dan pendampingan sebagai perhatian penting (Saraka et al., 2025). Perbedaan fokus ini membuka ruang untuk menghubungkan kajian mengenai perebutan perhatian dengan pertanggungjawaban terhadap kebutuhan masyarakat.

Masalah konseptual yang menjadi perhatian artikel ini ialah terputusnya tiga keputusan yang seharusnya berhubungan: menentukan masalah sosial, menetapkan dasar kebenaran pesan, dan memilih tindakan sesudah pesan beredar. Konten dapat relevan secara emosional tetapi lemah secara faktual. Klarifikasi dapat benar tetapi sulit diakses pihak terdampak. Ajakan kepedulian dapat memperoleh dukungan luas tetapi tidak mempunyai pengelola tindak lanjut. Ketiga keadaan tersebut menuntut prinsip yang mengaitkan konteks dengan konten, data dengan fakta, serta respons dengan solusi. Artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana perubahan relasi sosial digital memengaruhi dakwah sosial; prinsip apa yang diperlukan untuk menghubungkan tiga pasangan tersebut; dan bagaimana prinsip itu diterjemahkan menjadi keputusan serta indikator evaluasi? Tujuannya merumuskan kerangka operasional dalam sosiologi dakwah kontemporer. Kontribusi yang ditawarkan adalah prosedur tiga uji yang menghubungkan diagnosis, publikasi, dan tindak lanjut. Klaim kontribusi dibatasi pada sintesis konseptual terhadap literatur terpilih; artikel tidak menyatakan bahwa seluruh penelitian sebelumnya mengabaikan persoalan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan naratif kritis dengan analisis konseptual-komparatif. Pilihan tersebut sesuai dengan tujuan merumuskan hubungan antarkonsep dan menilai implikasi praktiknya. Kajian ini tidak dirancang sebagai tinjauan sistematis, meta-analisis, ataupun penelitian lapangan. Tidak ada wawancara, survei, pengamatan akun oleh penulis, atau perhitungan dampak intervensi yang dilaporkan sebagai data primer. Temuan penelitian terdahulu digunakan sesuai desain, konteks, dan batas penjelasannya. Penelusuran dilakukan melalui mesin pencari web menuju laman penerbit, jurnal, repositori institusi, dan lembaga resmi. Kata kunci meliputi dakwah sosial digital, otoritas keagamaan, digital da'wah, *religious authority*, *transformative da'wah*, *information disorder*, dan *community empowerment*. Bahan yang ditelaah mencakup publikasi sampai Oktober 2026, dengan perhatian pada kajian digital periode 2020–2026 serta karya lebih awal yang relevan secara teoritis. Pemilihan bersifat purposif: sumber harus berkaitan langsung dengan masalah, dapat ditelusuri, dan menyediakan penjelasan yang memadai mengenai konsep atau metode. Artikel jurnal digunakan untuk

membandingkan argumentasi dan temuan kasus; buku digunakan untuk orientasi keilmuan; publikasi resmi digunakan untuk konteks statistik atau prinsip tata kelola. Sumber yang sekadar mengulang pentingnya teknologi tanpa uraian analitis tidak dijadikan dasar utama. Metadata diperiksa pada laman dan, ketika tersedia, naskah terbitan. Untuk Wahyudi et al., tahun 2026 mengikuti volume 20 nomor 1 dan tahun edisi pada PDF, walaupun laman mencatat publikasi daring lebih awal pada Desember 2025.

Analisis mencakup pemetaan persoalan sosial dan unit kajian setiap sumber, perbandingan penjelasan perubahan otoritas serta partisipasi, dan pemisahan klaim normatif dari bukti empiris. Hasil perbandingan kemudian disintesis menjadi prinsip, keputusan operasional, dan indikator yang dapat diperiksa. Ayat Al-Qur'an dipakai sebagai orientasi etik melalui pembacaan tematis terbatas, bukan sebagai pengganti analisis tafsir yang mendalam. Ketelitian dijaga dengan menyatakan asal klaim, menghindari generalisasi dari kasus terbatas, dan membedakan ilustrasi rancangan dari kejadian yang diteliti. Seleksi sumber yang tidak menyeluruh serta belum adanya pengujian lapangan menjadi keterbatasan utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwah sosial digital sebagai hubungan sosial

Dalam artikel ini, dakwah sosial dipahami sebagai praktik mengaktualisasikan nilai Islam melalui komunikasi, pendampingan, serta tindakan bersama untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Sebutan digital menunjuk pada keterlibatan media berjejaringan dalam pembentukan masalah, pertukaran makna, pengorganisasian, dan evaluasi kegiatan. Definisi kerja ini membatasi pembahasan pada hubungan pesan keagamaan dengan tanggung jawab sosial. Sebuah ungkapan tentang kepedulian baru dapat dinilai sebagai bagian dari pemberdayaan apabila terdapat penjelasan mengenai partisipasi warga, akses dukungan, dan tindak lanjutnya. Perhatian sosiologis mencakup tiga tingkat. Pada tingkat mikro, warga menafsirkan pesan melalui pengalaman, emosi, kepercayaan, dan hubungan keseharian. Pada tingkat meso, pengurus masjid, komunitas, organisasi, serta pengelola akun menyeleksi aspirasi dan mengatur sumber daya. Pada tingkat makro, ketimpangan sosial dan tata kelola platform membentuk kesempatan untuk terlihat maupun memperoleh bantuan. Ketiganya perlu dipertemukan agar persoalan yang bersifat struktural tidak dijelaskan hanya sebagai kekurangan akhlak individu.

Otoritas menjadi hubungan sosial yang penting. Hannan dan Mursyidi (2023) membahas fragmentasi otoritas melalui praktik di media sosial, sedangkan Muzayana (2023) memperlihatkan pembentukan otoritas pada sejumlah pendakwah TikTok. Kedua kajian membantu melihat bahwa saluran pengakuan menjadi lebih beragam. Namun, ragam sumber pengakuan tidak cukup untuk menyimpulkan hilangnya otoritas ulama. Pengetahuan agama, kedekatan budaya, legitimasi organisasi, kecakapan penyajian, serta jaringan pengikut dapat hadir bersama dengan bobot berbeda pada komunitas tertentu. Kekuasaan platform juga memerlukan pembacaan yang tidak deterministik. Lim (2017), melalui konteks politik Indonesia, menjelaskan hubungan pengguna dan media sosial dalam pembentukan enclave algoritmik. Temuan pada konteks tersebut berguna sebagai peringatan analitis, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap komunitas dakwah membentuk kebencian. Implikasi bagi penelitian dakwah adalah memeriksa interaksi antara seleksi pesan, jaringan pergaulan, identitas kelompok, dan pengorganisasian sosial. Algoritma tidak selangkahnya dijadikan penjelasan tunggal tanpa data mengenai proses distribusi konten.

Peta literatur dan posisi argumentasi

Terdapat perbedaan penting antara kajian yang menekankan pergeseran legitimasi dan kajian yang menunjukkan keberlanjutan hubungan dengan otoritas lama. Rachman et al. (2025)

menekankan kompleksitas serta ketidakpastian otoritas pada media sosial melalui analisis konten dan perspektif post-normal times. Muzayana (2023) memperlihatkan bahwa praktik pendakwah digital tetap berhubungan dengan sumber pengetahuan keagamaan. Perbedaan itu dapat dibaca sebagai variasi mekanisme: visibilitas digital mengubah jalur pengakuan, tetapi hubungan dengan lembaga dan tradisi keilmuan dapat tetap berfungsi. Sulfikar dan Yasmine (2025) membantu menjelaskan legitimasi dalam hubungan pengetahuan, persona, dan kondisi platform. Sementara itu, Zaman et al. (2026) menggambarkan kontestasi yang juga membuka ruang adaptasi dan kerja sama. Artikel ini mengambil implikasi bahwa penilaian seorang pendakwah memerlukan pemeriksaan berlapis. Kompetensi keagamaan, integritas perilaku, keterbukaan koreksi, serta tanggung jawab pengelolaan bantuan tidak dapat diwakili oleh satu indikator jumlah pengikut. Masing-masing aspek memerlukan bukti yang sesuai dengan keputusan yang hendak dibuat.

Kajian etika dan pemberdayaan memberi arah tambahan. Nase et al. (2025) menggunakan etnografi virtual, analisis kasus, serta wawancara untuk membahas moderasi dan etika komunikasi. Wahyudi et al. (2026) menggunakan studi kasus dengan observasi dan tujuh informan kunci pada Majelis Sabilu Taubah. Kajian pertama mengingatkan pentingnya pertanggungjawaban komunikasi; kajian kedua memperlihatkan hubungan bahasa, penerimaan sosial, dan partisipasi pada komunitas tertentu. Keduanya tidak menyediakan ukuran efek yang dapat dipindahkan begitu saja ke seluruh praktik dakwah digital.

Tabel 1. Perbandingan literatur dan kebutuhan analitis

Sumber dan Pendekatan	Fokus Kontribusi	Batas dan Implikasi
Muzayana (2023); kajian pendakwah TikTok	Pembentukan otoritas pada figur digital	Kasus terpilih; tidak mewakili semua pengguna
Rachman et al. (2025); analisis konten, post-normal times	Kompleksitas perubahan legitimasi	Penjelasan interpretatif; bukan estimasi efek algoritma
Sulfikar dan Yasmine (2025); kajian konseptual	Legitimasi dalam kondisi platformisasi	Perlu pemeriksaan praktik pada konteks tertentu
Nase et al. (2025); etnografi virtual dan wawancara	Moderasi serta etika komunikasi	Kasus kontroversial; generalisasi perlu dibatasi
Wahyudi et al. (2026); studi kasus komunitas	Inklusi dan konstruksi makna bersama	Konteks komunitas tertentu; bukan ukuran efek nasional
Zaman et al. (2026); analisis kualitatif digital	Kontestasi dan adaptasi otoritas	Perlu dibedakan antara pola wacana dan manfaat sosial

Sumber: perbandingan penulis atas sumber yang dicantumkan; rumusan batas merupakan penilaian analitis artikel ini.

Perbandingan tersebut menempatkan kontribusi artikel pada hubungan antarkeputusan. Perspektif otoritas menjelaskan siapa yang dipercaya; etika komunikasi menilai bagaimana pesan disampaikan; pemberdayaan menanyakan perubahan kemampuan serta akses warga. Ketiganya diperlukan ketika sebuah unggahan tentang kemiskinan, konflik, atau bantuan berkembang menjadi tindakan kolektif. Kerangka yang diajukan berikut menghubungkan dimensi tersebut

melalui uji konteks, uji bukti, dan uji solusi, dengan kemungkinan kembali ke tahap sebelumnya apabila ditemukan kekurangan.

Konteks dan konten: ketepatan membaca masyarakat

Konteks merupakan susunan keadaan yang membuat suatu pesan diterima, ditolak, atau dimaknai secara berbeda. Unsurnya meliputi kebutuhan, sejarah hubungan warga, bahasa, posisi sosial, akses teknologi, serta pengalaman terhadap lembaga. Konten ialah hasil seleksi masalah dan cara penyampaian. Prinsip hubungan keduanya adalah bahwa penyusunan pesan perlu berangkat dari diagnosis yang dapat diperiksa bersama masyarakat. Komentar paling ramai tidak otomatis menjadi kebutuhan paling mendesak karena sebagian warga tidak mempunyai kesempatan menyampaikan persoalannya secara terbuka. Diagnosis dapat dimulai melalui percakapan kelompok kecil, catatan pengaduan, pemetaan layanan, serta pertemuan dengan warga yang jarang terwakili. Pengurus perlu menanyakan siapa yang mendefinisikan masalah dan pengalaman siapa yang belum terdengar. Misalnya, rendahnya kehadiran perempuan dalam kelas literasi digital dapat berkaitan dengan waktu pengasuhan, lokasi kegiatan, biaya transportasi, atau rasa aman. Konten motivasi yang menganggap semua ketidakhadiran sebagai kurangnya kemauan akan menghasilkan diagnosis yang sempit serta berpotensi memperkuat stigma.

Prinsip hikmah pada QS an-Nahl [16]:125 dapat menjadi orientasi untuk menimbang kecocokan cara, bahasa, dan akibat ajakan. QS al-Hujurat [49]:11-12 memberi dasar etik penghormatan martabat dalam hubungan sosial. Penarikan implikasi praktisnya adalah tanggung jawab manusia yang memerlukan penjelasan. Humor, misalnya, perlu dinilai dari hubungan kuasa antara penutur dan pihak yang dijadikan bahan candaan. Respons tawa audiens tidak dengan sendirinya menunjukkan persetujuan orang yang dipermalukan atau membenarkan penyebaran ulang rekamannya. Penyesuaian konten juga memerlukan desain berlapis. Pesan singkat dapat membuka perhatian, lalu dihubungkan dengan penjelasan utuh, rujukan, dan ruang konsultasi. Warga dengan akses terbatas membutuhkan jalur lain, seperti penjelasan tatap muka atau bahan cetak sederhana. Fakhruroji (2017) memberikan orientasi untuk memahami dakwah internet sebagai bagian dari perubahan praktik komunikasi. Pengembangan artikel ini menegaskan bahwa pemilihan format perlu dinilai melalui kemampuan warga memahami dan menggunakan informasi, bukan hanya kelancaran produksi atau kecepatan unggah.

Konten yang peka konteks juga perlu menyatakan batas kewenangan. Pendakwah dapat menguatkan solidaritas dan mendampingi akses layanan, sedangkan penjelasan teknis tertentu memerlukan tenaga yang kompeten. Dalam masalah utang, misalnya, nasihat tanggung jawab perlu dibarengi informasi bantuan yang dapat ditelusuri dan penilaian kondisi ekonomi warga. Pembagian peran tersebut memperluas kemungkinan kerja sama sekaligus mengurangi kecenderungan menjadikan satu figur sebagai sumber jawaban untuk seluruh masalah kehidupan.

Data dan fakta: tabayyun serta pertanggungjawaban bukti

Data merupakan rekaman, angka, dokumen, atau keterangan yang dikumpulkan; fakta yang dipakai dalam argumentasi memerlukan pemeriksaan atas asal, konteks, dan kecukupan buktinya. Banyaknya tangkapan layar tidak menjamin banyaknya sumber independen karena beberapa unggahan dapat berasal dari satu pesan. Demikian pula, kesaksian seseorang merupakan bukti tentang pengalamannya, tetapi belum tentu menjelaskan keseluruhan peristiwa. Prinsip yang diajukan adalah menyesuaikan kekuatan pernyataan dengan mutu bukti yang tersedia serta menyebutkan bagian yang belum diketahui. Wardle dan Derakhshan (2017) membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi berdasarkan hubungan kebenaran informasi dengan maksud merugikan. Pembedaan ini mencegah penyamaan semua informasi

bermasalah sebagai kebohongan yang disengaja. Niat pembuat pesan tidak dapat disimpulkan hanya dari ketidakakuratan isi. Untuk dakwah sosial, informasi yang benar pun memerlukan pertimbangan akibat ketika menyangkut identitas, kondisi ekonomi, atau pengalaman pribadi seseorang. Ketepatan faktual dan kelayakan penyebaran merupakan dua pertanyaan yang perlu dijawab tersendiri.

Dalam QS. al-Hujurat ayat 6 memberi orientasi normatif agar informasi diperiksa sebelum menimbulkan akibat yang merugikan. Artikel ini menerjemahkan orientasi tersebut menjadi langkah kerja: menemukan sumber awal, memeriksa tanggal serta lokasi, membandingkan rekaman dengan konteks lengkap, meminta penjelasan pihak terkait, dan menyatakan status kepastian. Status dapat berupa terkonfirmasi, belum terkonfirmasi, menyesatkan karena konteks, atau perlu koreksi. Kategori itu merupakan usulan operasional artikel, bukan kutipan kategori tekstual Al-Qur'an maupun hasil pengujian klasifikasi.

Verifikasi juga mencakup angka. Data akses internet BPS tidak boleh ditafsirkan sebagai persentase warga yang menerima dakwah. Jumlah tayangan bukan jumlah orang unik, komentar tidak selalu berasal dari peserta program, dan dukungan daring belum menunjukkan perubahan kemampuan. Jika pengelola menyatakan program membantu warga memperoleh layanan, diperlukan catatan mengenai permohonan, rujukan, hambatan, dan tindak lanjut. Bukti tersebut dapat dikumpulkan secara terbatas sesuai kebutuhan, tanpa mempublikasikan seluruh identitas penerima manfaat. Pertanggungjawaban bukti perlu meliputi mekanisme koreksi. Pengelola dapat menempatkan rujukan pada keterangan unggahan, mencatat waktu perubahan, dan menjelaskan bagian yang diperbaiki. Apabila kesalahan telah tersebar, koreksi perlu disampaikan melalui saluran yang menjangkau audiens sebelumnya. Menghapus unggahan mungkin diperlukan untuk menghentikan kerugian, tetapi penghapusan saja belum memastikan pembaca mengetahui pembetulanannya. Transparansi tidak berarti membuka data pribadi; pengelola dapat menjelaskan proses pemeriksaan dan hasil agregat dengan tetap membatasi akses pada catatan sensitif.

Respons dan solusi: dari percakapan menuju tindakan bersama

Respons adalah tanggapan terhadap persoalan atau percakapan yang muncul. Solusi merupakan rancangan tindakan yang mempunyai tujuan, pelaksana, sumber daya, jalur akses, dan penilaian hasil. Keduanya berhubungan, tetapi respons cepat belum menjamin tersedianya dukungan. Dakwah sosial memerlukan keputusan mengenai tanggapan yang cukup melalui penjelasan publik dan persoalan yang membutuhkan pendampingan individual. Warga yang menanyakan cara mengakses bantuan, misalnya, memerlukan petunjuk yang dapat digunakan serta pihak yang bertanggung jawab menindaklanjuti hambatan.

Zaeni et al. (2020) membahas pemberdayaan umat dalam perspektif Al-Qur'an dan menempatkan dimensi material serta spiritual dalam perhatian dakwah. Saraka et al. (2025) memperluas pembahasan dakwah transformatif menuju pendidikan, ekonomi, dan peran kelembagaan. Sebagai kajian kepustakaan, keduanya memberi argumentasi orientasi, bukan bukti efektivitas program digital tertentu. Artikel ini mengembangkan implikasi bahwa ajakan solidaritas perlu disertai pengaturan kerja, pembagian tanggung jawab, dan penilaian apakah warga dapat menggunakan dukungan yang dijanjikan. Kabeer (1999), dalam kajian pemberdayaan perempuan, menghubungkan sumber daya, agensi, dan pencapaian. Penerapannya pada artikel ini merupakan adaptasi analitis: bantuan menjadi lebih bermakna ketika memperluas kemampuan warga menentukan pilihan dan menjalankan tindakan yang dianggap penting. Penyerahan bantuan belum cukup untuk menunjukkan pemberdayaan. Pengelola perlu memeriksa apakah penerima mempunyai kesempatan menyampaikan

kebutuhan, menolak publikasi identitas, mengajukan keberatan, dan ikut menentukan tindak lanjut. Hubungan pendampingan yang terlalu bergantung pada figur tertentu juga perlu dinilai.

Respons terhadap kritik membutuhkan pembedaan antara pertanyaan, keberatan, ketidakakuratan, dan serangan yang membahayakan. Kritik dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai pengalaman yang terlewat. Pengelola dapat menjelaskan dasar keputusan, meminta masukan tambahan, atau mengakui kekurangan. Jika muncul penghinaan serta penyebaran identitas pribadi, moderasi dilakukan berdasarkan aturan yang diketahui pengguna. Prinsip tata kelola UNESCO (2023) mengenai transparansi, akses informasi, dan pertanggungjawaban memberi rujukan untuk menyusun aturan komunitas, dengan penyesuaian terhadap kapasitas serta konteks lembaga dakwah. Solusi juga memerlukan jejaring. Masjid, majelis taklim, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan penyedia layanan dapat berbagi peran tanpa mengambil alih seluruh kewenangan masing-masing. Sebuah komunitas dapat menangani penerimaan pengaduan, sementara penanganan teknis dilakukan melalui rujukan yang disepakati. Rancangan ini membawa pertanyaan sosiologis tentang kepercayaan, pembagian kuasa, dan siapa yang mempunyai akses. Solidaritas perlu diorganisasikan agar warga dengan kedekatan terbatas kepada pengurus tetap memperoleh kesempatan yang adil.

Kerangka tiga uji dan ilustrasi penerapan

Sintesis artikel menghasilkan tiga uji yang berurutan tetapi dapat diulang: kecukupan konteks, kelayakan bukti, dan keterlaksanaan solusi. Uji pertama menanyakan kecukupan diagnosis serta keterwakilan pengalaman warga. Uji kedua memeriksa kepastian informasi dan kelayakan penyebarannya. Uji ketiga menilai penanggung jawab, akses, sumber daya, serta tindak lanjut. Sebuah pesan dapat layak dipublikasikan sebagai informasi terbatas sambil menyatakan ketidakpastian; ajakan tindakan yang lebih berisiko membutuhkan dasar dan kesiapan yang lebih kuat.

Tabel 2. Kerangka tiga uji dakwah sosial digital

Pasangan dan Uji	Pertanyaan Keputusan	Tindakan bila Belum Memadai
Konteks–konten: kecukupan konteks	Apakah masalah dan bahasa mencerminkan pengalaman kelompok yang terdampak?	Dengar kelompok yang belum terwakili; ubah diagnosis dan format
Data–fakta: kelayakan bukti	Apa yang terkonfirmasi, apa yang belum diketahui, dan apa yang layak dibuka?	Telusuri sumber; persempit klaim; lindungi identitas; siapkan koreksi
Respons–solusi: keterlaksanaan solusi	Siapa menindaklanjuti, dengan dukungan apa, dan bagaimana warga mengaksesnya?	Tetapkan pengelola dan rujukan; sesuaikan janji dengan kapasitas

Sumber: sintesis konseptual penulis berdasarkan pembahasan; kerangka belum diuji secara empiris.

Hubungan ketiga uji menunjukkan bahwa kualitas dakwah sosial tidak dapat dijumlahkan secara sederhana. Bukti yang kuat tidak menggantikan kebutuhan melindungi identitas; konten yang santun tidak menggantikan pemeriksaan fakta; kegiatan yang disukai tidak menggantikan kesempatan warga mengajukan keberatan. Jika satu uji belum memadai, bentuk tindakan dapat

diubah. Pengelola dapat menunda penyebutan pihak, mempersempit klaim, menyediakan konsultasi tertutup, atau mencari mitra sebelum menjanjikan layanan kepada masyarakat. Sebagai ilustrasi hipotetis, sebuah grup warga menerima video yang menuduh keluarga tertentu mengambil bantuan sosial secara tidak sah. Ilustrasi ini tidak merujuk pada kejadian atau hasil observasi penulis. Melalui uji konteks, pengelola menelusuri keluhan tentang distribusi bantuan dan mendengar pihak yang sulit mengakses forum warga. Melalui uji bukti, pengelola memeriksa sumber rekaman, waktu, ketentuan program yang benar-benar dirujuk, serta penjelasan pihak terkait. Wajah dan identitas keluarga tidak disebarluaskan selama pemeriksaan.

Melalui uji solusi, pengelola mengarahkan pengaduan kepada kanal resmi yang relevan, menjelaskan proses secara umum, dan mendampingi warga yang mengalami hambatan. Jika ditemukan kekeliruan informasi, koreksi disampaikan pada grup tempat kabar beredar. Jika ditemukan persoalan prosedur, tindak lanjut diarahkan pada perbaikan akses dan penjelasan kriteria. Dakwah dalam situasi ini menghubungkan pesan keadilan dengan penanganan persoalan, tanpa menjadikan keluarga rentan sebagai objek penghukuman publik. Keberhasilannya memerlukan bukti penyelesaian serta pengalaman warga yang terdampak. Ilustrasi tersebut juga memperlihatkan batas penerapan. Verifikasi membutuhkan waktu, sedangkan desakan publik dapat bergerak cepat. Pengelola perlu menyampaikan apa yang sedang diperiksa dan menghindari janji waktu yang tidak sanggup dipenuhi. Jika ada risiko kerugian langsung, dukungan awal yang proporsional dapat diberikan tanpa menyimpulkan tuduhan yang belum terbukti. Kerangka tiga uji dimaksudkan untuk membantu penalaran dan pembagian tanggung jawab, sehingga penerapannya tetap memerlukan penilaian situasi oleh pihak yang kompeten.

Evaluasi, proposisi penelitian, dan keterbatasan

Evaluasi perlu membedakan keluaran komunikasi, hasil antara, serta perubahan sosial. Tayangan dan keterlibatan menunjukkan peredaran pesan, sedangkan kemampuan memeriksa informasi memerlukan penilaian praktik. Tersedianya tautan layanan menunjukkan keluaran, sementara keberhasilan menggunakan layanan memerlukan catatan tindak lanjut dan penjelasan warga. Perubahan yang berkelanjutan memerlukan pengamatan lebih lama serta pemeriksaan kondisi lain. Pembedaan tersebut membantu pengelola menghindari klaim manfaat sosial yang hanya didasarkan pada statistik media.

Tabel 3. Dimensi evaluasi dan bukti yang diperlukan

Dimensi	Contoh Bukti	Batas Penafsiran
Partisipasi bermakna	Keragaman pihak yang didengar dan perubahan keputusan akibat masukan	Kehadiran tidak otomatis menunjukkan pengaruh
Kualitas informasi	Keterlacakan sumber, status kepastian, dan penyampaian koreksi	Banyak rujukan belum menjamin sumber independen
Kemampuan warga	Praktik memeriksa pesan dan menjelaskan alasan penilaian	Jawaban tes perlu dibandingkan dengan praktik
Akses tindak lanjut	Rujukan, penyelesaian permohonan, dan hambatan yang dialami	Rujukan belum tentu menghasilkan penerimaan layanan

Dimensi	Contoh Bukti	Batas Penafsiran
Keadilan serta pembelajaran	Pengalaman kelompok berbeda, pengaduan, dan perubahan prosedur	Perubahan perlu ditelusuri bersama faktor lain

Sumber: rancangan evaluasi penulis; indikator merupakan usulan penelitian dan pengelolaan kegiatan.

Tiga proposisi dapat diturunkan untuk penelitian berikutnya. Pertama, kesesuaian diagnosis dengan pengalaman kelompok yang beragam diperkirakan berhubungan dengan relevansi konten dan kemauan berpartisipasi. Kedua, keterlacakan sumber serta keterbukaan koreksi diperkirakan mendukung kepercayaan ketika terjadi ketidakpastian informasi. Ketiga, tersedianya pendampingan dan rujukan diperkirakan memperkuat hubungan antara pemahaman pesan dan penggunaan layanan. Ketiganya merupakan dugaan yang memerlukan pemeriksaan, termasuk terhadap kemungkinan penjelasan lain seperti kedekatan personal, pengalaman bantuan sebelumnya, dan kapasitas lembaga.

Pengujian dapat memakai studi kasus komparatif pada komunitas dengan tingkat akses berbeda. Wawancara warga yang aktif maupun tidak aktif perlu dipertemukan dengan observasi kegiatan, dokumentasi keputusan, dan catatan rujukan yang disamakan. Penilaian sebelum dan sesudah program dapat membantu melihat perubahan, tetapi tidak cukup untuk memastikan sebab akibat tanpa pemeriksaan faktor lain. Penelitian juga perlu mencari pengalaman yang tidak sesuai dugaan, seperti warga yang memahami pesan tetapi tetap tidak memperoleh layanan karena hambatan administratif atau biaya.

Kerangka ini terbatas oleh sifat kajian naratif, cakupan literatur yang dipilih, serta dominasi kajian kasus Indonesia. Efektivitas tiga uji belum diperiksa pada lapangan yang berbeda. Kapasitas pengelola dan risiko eksklusi juga dapat membatasi penerapannya. Karena itu, prinsip digunakan secara proporsional dan dievaluasi bersama warga. Nilai akademiknya terletak pada hubungan konsep dan keputusan yang dapat dikritik serta diteliti, sementara nilai praktisnya masih perlu dibuktikan melalui pengalaman penerapan yang terdokumentasi.

SIMPULAN

Prinsip dakwah sosial dalam masyarakat digital kontemporer memerlukan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara konteks dan konten, data dan fakta, serta respons dan solusi. Perspektif sosiologi dakwah memperlihatkan pentingnya relasi otoritas, distribusi kesempatan berbicara, ketimpangan akses, dan kemampuan lembaga menindaklanjuti kebutuhan. Konten perlu bertumpu pada diagnosis partisipatif; klaim perlu sebanding dengan bukti dan mempertimbangkan martabat; respons perlu terhubung dengan dukungan yang mempunyai penanggung jawab serta jalur akses yang jelas.

Kerangka tiga uji menghubungkan kecukupan konteks, kelayakan bukti, dan keterlaksanaan solusi sebagai prosedur sebelum serta sesudah publikasi. Kontribusinya adalah menempatkan keputusan komunikasi dalam rangkaian tindakan sosial yang dapat dievaluasi melalui pengalaman warga. Kajian ini belum membuktikan efektivitas kerangka. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memeriksa mekanisme, kondisi pendukung, dan akibat yang tidak dikehendaki. Dakwah sosial digital dengan demikian diarahkan pada pembelajaran bersama, keadilan akses, serta perbaikan tindakan berdasarkan bukti yang terbuka untuk koreksi.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik telekomunikasi Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>
- Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(1), 5–17. <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>
- Fakhrurroji, M. (2017). *Dakwah di era media baru: Teori dan aktivisme dakwah di internet*. Simbiosis Rekatama Media. <https://digilib.uinsgd.ac.id/31509/>
- Hannan, A., & Mursyidi, A. F. (2023). Social media and the fragmentation of religious authority among Muslims in contemporary Indonesia. *Digital Muslim Review*, 1(2), 84–104. <https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10>
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Muzayana. (2023). TikTok, digital da'wa and religious authorities. *Journal of Islamic Communication and Counseling*, 2(1), 46–55. <https://doi.org/10.18196/jicc.v2i1.24>
- Nase, N., Holina, H., & Syah, Y. H. H. (2025). Phenomenon of digital da'wah: Analysis of religious moderation and the ethics of da'wah communication on social media. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 45(2), 313–340. <https://doi.org/10.21580/jid.v45.2.27992>
- Rachman, A., Saumantri, T., & Hidayatulloh, T. (2025). Transformation of religious authority in the digital era: A post-normal times analysis by Ziauddin Sardar on the phenomenon of social media da'wah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 45(1), 107–122. <https://doi.org/10.21580/jid.v45.1.25644>
- Saraka, M. Y., Monarshi, E. R., & Shabrina, N. (2025). Transformative da'wah in Indonesia: Challenges of equity and opportunities for synergy of Islamic organizations and states. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 19(1), 131–148. <https://doi.org/10.24090/komunika.v19i1.10570>
- Solahudin, D., & Fakhrurroji, M. (2020). Internet and Islamic learning practices in Indonesia: Social media, religious populism, and religious authority. *Religions*, 11(1), Article 19. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>
- Sulfikar, A., & Yasmine, D. I. (2025). Platformized religious authority: Rethinking legitimacy in the age of social media influencers. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 20(2), 141–171. <https://doi.org/10.21274/epis.2025.20.02.141-171>
- UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms: Safeguarding freedom of expression and access to information through a multistakeholder approach*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387339>
- Wahyudi, R., Khafsoh, N. A., & Matroni. (2026). Transformative da'wah communication for marginalized communities: A case study of Majelis Sabilu Taubah. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 20(1), 19–34. <https://doi.org/10.24090/komunika.v20i1.13480>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe. <https://rm.coe.int/168076277c>

- Zaeni, H., Mukmin, H., Syahril, S., Yanti, F., & Aswadi, A. (2020). Dakwah pemberdayaan umat perspektif Al-Qur'an. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 14(1), 95–110. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i1.3276>
- Zaman, W. K., Supena, I., Sulthon, M., & Amirudin, M. (2026). Digital da'wah and authority contestation in Indonesia: Between traditional ulama and modern influencers. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(1), 169–192. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v12i1.19457>